

Eksklusi Sosial pada Pendidikan Era Digital: Kasus Pembelajaran Jarak Jauh

Minanda Aulia Rahmah¹, Nadia Yovani²

^{1,2}Universitas Indonesia

¹minanda.ar@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi memberikan dampak signifikan terhadap segala bentuk kegiatan manusia dalam berjejaring, Perihal tersebut juga berdampak terhadap ranah pendidikan yang harus mengintegrasikan pembelajaran dengan teknologi informasi, dengan adanya hal tersebut dapat menjadi media bagi para guru dan siswa untuk dapat memperoleh berbagai informasi yang tidak terbatas dengan mudah serta cepat. Namun, terdapat beberapa indikator yang menjadi faktor kesenjangan digitalisasi Pendidikan, selanjutnya dapat di klasifikasikan berdasarkan usia, gender, etnis, pekerjaan, pendidikan dan kebangsaan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif sebagai upaya untuk dapat mendeskripsikan berbagai fenomena, laporan, aktifitas yang terjadi setelah dianalisa berdasarkan inklusi sosial kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Masih terdapat kesenjangan dalam pemerataan teknologi Pendidikan yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya yakni pembiayaan, perangkat computer, jaringan internet serta pemerataan pendanaan dimasing-masing daerah. Terlebih adanya kesenjangan pada pihak sekolah, terutama bagi sekolah dengan akses, sarana serta prasarana yang belum memadai untuk dapat melaksanakan pembelajaran secara digital. 2) Para guru sebagai dewan pendidik masih memerlukan pengembangan sumber daya manusia terkait dengan teknologi Pendidikan, sebab lebih dari separuh guru yang ada dalam dunia Pendidikan masih kurang mampu menjalankan pembelajaran digital secara maksimal sehingga lebih memilih untuk menerapkan metode konvensional pada pembelajaran.

Kata Kunci: Eksklusi Sosial, Teknologi Pendidikan, Teknologi Informasi

Pendahuluan

Perkembangan teknologi memberikan dampak signifikan terhadap segala bentuk kegiatan manusia dalam berjejaring (Setiawan, 2018), adanya hal tersebut dapat mempermudah segala aktivitas yang dilaksanakan dengan teknologi informasi. Perihal tersebut juga berdampak terhadap ranah pendidikan yang harus mengintegrasikan pembelajaran dengan teknologi informasi, dengan adanya hal tersebut dapat menjadi media bagi para guru dan siswa untuk dapat memperoleh berbagai informasi yang tidak terbatas dengan mudah serta cepat. Sebagai upaya menjawab problematika pendidikan di era digitalisasi maka para praktisi pendidikan dituntut untuk terus beradaptasi dengan mengikuti perkembangan teknologi terbaru agar tidak ketinggalan informasi (Fajriyani et al., 2023), perihal tersebut berbanding lurus dengan adanya problematika yang memerlukan pemikiran dengan ranah tertinggi yang berkaitan dengan globalisasi, sosial budaya, perekonomian hingga politik (Castells, 2021).

Pendidikan dalam masa perkembangan teknologi menjadi kebutuhan pokok yang harus terpenuhi, sebab tanpa diiringi dengan pendidikan maka perkembangan teknologi dapat terbengkalai secara percuma baik bagi setiap individu ataupun kelompok sebab pendidikan merupakan karakteristik dari masyarakat universal yang menjadi kebutuhan primer dalam berbudaya (Habib, 2021). Peranan pendidikan berada pada posisi yang strategis sebagai upaya

untuk dapat mengembangkan kapasitas sumberdaya manusia untuk dapat bersaing dalam tataran internasional, maka tidak heran jika pemerintah selalu melakukan inovasi yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan, termasuk didalamnya yakni pemerataan pendidikan hingga ke pelosok negeri sebagai upaya untuk dapat memberikan kemudahan terhadap anak bangsa untuk turut serta berpartisipasi dalam dunia pendidikan untuk menuju pendidikan lebih baik bagi semua kalangan (Iskandar & Anam, 2018).

Sebagai negara yang selalu mengupayakan pemerataan pendidikan, pihak pemerintah menaruh harapan besar terhadap para generasi muda sebagai penerus bangsa untuk terus belajar terutama bagi para pendidik, sebab dari tangan dingin para gurulah masa depan bangsa dipertaruhkan. Perihal tersebut berdasarkan perundang-undangan No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang disampaikan oleh (Presiden Republik Indonesia, 2003) yang terdapat pada pasal I bab I yang berbunyi bahwa “Pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar yang terencana untuk suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga siswa dapat secara aktif mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya untuk mempunyai kekuatan secara spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta berbagai keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia kemudian akhirnya juga membuat medium pembelajaran *online* yang diberi nama dengan Rumah Belajar serta *platform* bagi para guru untuk dapat bergaji antar guru yang diberi nama dengan Guru Berbagi. Berdirinya rumah belajar sebagai wadah penyedia berbagai bahan pembelajaran serta menyediakan fitur khusus sehingga para pengguna dapat berinteraksi secara langsung terkait dengan berbagai pembelajaran yang tersedia namun belum dipahami, sedangkan dalam *platform* guru berbagi menyediakan berbagai alat dan media yang digunakan dalam pembelajaran yang dapat diterapkan oleh setiap guru, namun apabila masih terdapat kesulitan dalam mengakses kedua hal tersebut, maka pemerintah telah melakukan sinergitas dengan pihak swasta sehingga dapat menyebarkan informasi terhadap masyarakat dalam beberapa waktu (Siregar, 2020).

Tidak hanya itu, Kemendikbud juga menyediakan berbagai bentuk layanan pembelajaran dengan melakukan kerja sama bersama pihak swasta yang berkecimpung dalam teknologi digital yang memberikan akses gratis pada setiap civitas pendidikan, adapula bantuan yang berupa paket dana internet gratis sehingga dapat mengakses perangkat pembelajaran secara gratis yang telah disediakan dalam bentuk digital (Rasidi et al., 2021). Kemitraan pemerintah dengan swasta mengalami peningkatan, namun tidak dipungkiri bahwa hambatan kesenjangan digital di Indonesia masih besar

Jika merujuk pada penelitian (Dijk, 2020), terdapat beberapa tolak ukur yang menjadi faktor yang mempengaruhi kesenjangan digital dapat dilihat dari usia, gender, etnis, pekerjaan, pendidikan dan kebangsaan. Kategori ini memiliki sumber daya yang tidak setara seperti material (pendapatan), mental (pengetahuan), sosial (hubungan), dan kapital budaya. Namun saat ini kesenjangan digital level satu perlahan mengecil sementara kesenjangan digital level dua masih mengalami perbesaran. Pada studinya, diperoleh data bahwa persentase akses fisik pada negara maju adalah sebesar 70% hingga 98% sementara negara berkembang masih berkisar pada rata-rata 40% hingga 42%. Kemudian hasil pengamatannya pada gap literasi digital adalah orang-orang yang memiliki pendidikan dan pekerjaan memiliki literasi digital lebih baik dibanding yang pendidikan rendah dengan pekerjaan manual, kemudian terdapat gap pula pada usia, yang mana usia muda lebih terliterasi dibanding usia tua. Belum berhenti sampai disitu, pada segi penggunaan juga terdapat gap antara yang menggunakan internet untuk produktifitas (kelas menengah keatas) dan mereka yang menggunakan untuk hiburan (kelas sosial bawah).

Dari studi (Dijk, 2020) ini, menggambarkan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki problem pada akses fisik, selain itu pada berbagai level kelas sosial di Indonesia

juga kemudian mengalami perbedaan kemampuan pada literasi digital (penggunaan). Jika kita melihat kembali pada keadaan di masa Pembelajaran Jarak Jauh ini, maka memang terjadi beberapa kendala permasalahan yang berakibat pada perbedaan sumber daya ini. Pernah dijelaskan oleh (Yudhistira & Murdiani, 2020) bahwa kendala teknis seperti *server error* masih sering dijumpai oleh para guru ataupun siswa, selanjutnya kurangnya efektifitas ketepatan waktu selama menggunakan digitalisasi pembelajaran sehingga apabila para pendidik kurang variatif dalam melangsungkan pembelajaran dapat menimbulkan kebosanan pada diri siswa (Nurfadhilah et al., 2019). Kemudian pada mata pelajaran praktikum, PJJ tidak efektif untuk diterapkan karena pengajar hanya memberikan video langkah-langkah, namun siswa tidak melakukan praktikumnya sendiri.

Dengan latar belakang kasus ini, kita menyadari bahwa pendidikan nantinya akan berarah pada integrasi dunia teknologi informasi dan bioteknologi, namun apakah pendidikan haruslah berlandaskan hal tersebut? Misalnya anak-anak sekolah diwajibkan mengerti logika pemrograman, kemudian lulusannya diarahkan pada lingkungan yang *start-up* atau *decacorn*? (Kusumadewi, 2021) Ataukah sebenarnya masih banyak hal terlupa pada problem pendidikan di Indonesia mengingat banyaknya kesenjangan digital yang terjadi yang datang pada hakikatnya dari kesenjangan sosial masyarakat yang memang sudah ada sebelum adanya kesenjangan digital.

Berdasarkan hal ini maka penting untuk mengurai kembali bagaimana kesenjangan digital pada bidang pendidikan di Indonesia. *Evidence* yang terjadi pada masa kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh dapat menjadi fokus penelitian yang kemudian dapat dianalisa segi kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait kebijakan digitalisasi pendidikan dan bagaimana saran pada desain kebijakan yang inklusif.

Metode

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif sebagai upaya untuk dapat mendeskripsikan berbagai fenomena, laporan, aktifitas yang terjadi setelah dianalisa berdasarkan inklusi sosial kemasyarakatan (Sugiyono, 2020). Teknik analisis data dilakukan melalui berbagai sumber transformasi kepustakaan. Penelitian ini juga sebagai bahan kritik sosial terhadap studi (Hargittai et al., 2020) yang hanya berfokus pada peningkatan aksesibilitas serta pengetahuan teknologi komunikasi informasi sebagai upaya mengatasi kesenjangan digital

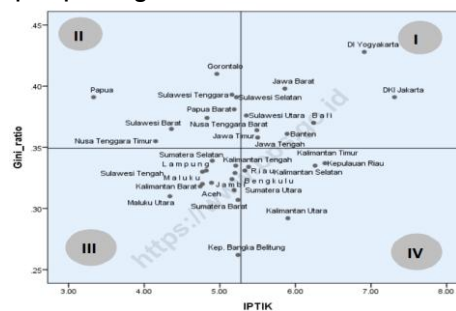
Hasil

Uraian Konsep dan Analisa pada Kasus

Terdapat tiga level indikator kesenjangan digital menurut (Dijk, 2020), level pertama adalah akses fisik ke media digital seperti komputer dan koneksi internet, level kedua adalah literasi digital atau penggunaan dan kemampuan menggunakan media digital serta level ketiga adalah hasil dari penggunaan internet dan komputer. Dalam teorinya, *Resources and Appropriation*, (Dijk, 2020) mengemukakan bagaimana seseorang secara khusus dan berdasarkan kategori posisi mereka dapat mengalami kelebihan atau kekurangan sumber daya merujuk pada empat fase proses dan hasil apropriasi dari teknologi. Contoh dari apropriasi teknologi ini misalnya, pada kategori posisi seseorang yang memiliki pendidikan dan pendapatan yang tinggi maka mereka dapat menggunakan teknologi informasi dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi berbayar, sedangkan pada yang berpendidikan dan pendapatan rendah biasanya hanya memiliki satu aplikasi berbayar dan itu melalui smartphone. Aplikasi pada smartphone dipandang masih

kurang mendukung keterampilan dalam pekerjaan, pendidikan dan bisnis jika dibandingkan dengan laptop atau komputer personal.

Indonesia memiliki indeks infrastruktur yang masih besar gap-nya. Menurut data BPS tahun 2019, melalui Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)/ *ICT Development Index* menerangkan bahwa pada tahun 2018, sub indeks akses dan infrastruktur tertinggi menurut provinsi adalah pada provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta (sebesar 7,26 - 10,00). Untuk akses sedang ada pada provinsi Bali, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, Bengkulu, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Jambi, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Barat, Maluku, Aceh dengan indeks sebesar (5,01 - 7,25). Untuk indeks terendah ada pada provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Papua sebesar (2,26 - 5,00) (Syakilah et al., 2019). Data ini menunjukkan bahwa negara Indonesia masih memiliki angka pembangunan infrastruktur dengan kesenjangan yang besar. Belum lagi secara penggunaan internet, data pada BPS tahun 2019 juga menunjukkan bahwa penggunaan internet terbesar ada pada provinsi DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Dengan menggunakan rasio gini, lebih detail lagi digambarkan bahwa walaupun DKI Jakarta memiliki tingkat penggunaan yang tinggi namun angka ketimpangannya juga cukup besar sebagaimana yang terdapat pada gambar dibawah ini



Gambar 1 Aspek Gini Rasio dan IP-TIK di Indonesia

Pada bagian ini ditunjukkan hasil yang diperoleh dari *scatter plot* antara gini ratio (September) 2019 serta IP-TIK 2019 yang terdapat pada keseluruhan provinsi di Indonesia berjumlah 34. Kuadran I merupakan berbagai provinsi dengan klasifikasi pembangunan TIK yang relatif tinggi, namun ketimpangan pendapatannya juga relatif besar. Kemudian pada Kuadran II menjadi klasifikasi berbagai provinsi dengan tingkat pengembangan TIK yang relatif rendah, ditambah dengan ketimpangan pendapatan yang juga besar. Selanjutnya Kuadran III menjadi klasifikasi pengembangan TIK yang relatif rendah, namun diiringi dengan meratanya pendapatan distribusi yang relatif sama. Sedangkan pada Kuadran IV menjadi bagian dari pengembangan serta pembangunan TIK relatif tinggi dan pendistribusian atau penyebaran pendapatan yang cukup sama rata. Gini rasio menjadi suatu indikator yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menunjukkan berbagai tingkat ketimpangan pendapatan secara keseluruhan, hasil yang diperoleh dari nilai koefisiensi tersebut berada pada kisaran angka 1 hingga 0. Selanjutnya koefisiensi yang terdapat pada gini mempunyai nilai 0 sehingga dapat mengindikasikan bahwa terdapat pemerataan pendapatann yang menyeluruh.

Data-data ketidak seimbangan ini dapat membuat ketidak seimbangan sosial lainnya. Misalnya ketidak seimbangan pada akses informasi dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang nantinya juga akan mempengaruhi tingkat literasi digital mereka. Dengan menurunnya tingkat literasi digital akan sangat berpengaruh pada banyak masalah sosial misalnya tingkat pengetahuan dan pemahaman seorang individu hingga pemecahan permasalahan pada pekerjaannya. Misalnya pada rekomendasi yang dilakukan balai agama di Semarang terkait

proses Pembelajaran Jarak Jauh pada guru agama islam dan madrasah, dikatakan bahwa Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI perlu meningkatkan diklat TIK PJJ untuk guru dan madrasah dan PAI (Nugraha, 2020).

Hal ini tidak berhenti pada ketidakseimbangan literasi digital saja, karena kemudian perbedaan struktur sosial pada masyarakat turut mempengaruhi ketidaksetaraan pada penggunaan internet oleh masyarakat, dan bahkan (Dijk, 2020) juga mengatakan bahwa ketidaksetaraan yang terjadi pada dunia digital turut mendorong juga ketidaksetaraan pada dunia fisik. Bahwa sangat sukar untuk memperjuangkan ketidaksetaraan digital tanpa lebih dahulu memperjuangkan kesetaraan sosial. Saat ini perspektif ekonomi dan teknologi sangat mewarnai kebijakan pemerintah dan institusi kebijakan lainnya sementara perspektif pendidikan dan sosial muncul setelahnya. (Holloway, 2005) membedakan antara *second digital divide* (Hargittai et al., 2020) yang membahas tentang skill berdarang dan penggunaannya dan dengan apa yang Zhao fokuskan pada studinya yaitu tentang dengan siapakah seseorang dapat secara konsisten dan terpercaya berkomunikasi secara daring dan bagaimana komunikasi tersebut dapat menawarkan cara untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Menurutnya terdapat kesenjangan yang dalam antara orang yang memiliki akses pada jaringan sosial (*valued social network*) dengan modal sosial tertentu (*sharing social capital*) dan orang-orang yang tidak memiliki hal tersebut.

Menurut (Pratama & Wardani, 2023) konsep kapital lekat kaitannya dengan ekonomi dan material. namun, makna kapital dapat muncul dalam masyarakat dalam bentuk *economic capital*, *cultural capital* dan *social capital*. Gagasan tentang *social capital* (modal sosial) inilah yang menjadi cara untuk menggambarkan prinsip aset sosial yang terlihat dimana individu yang berbeda ini memperoleh ketidak setaraan atas modal yang kurang lebih setara (ekonomi atau budaya) dan sejauh mana mereka dapat melakukan mobilisasi melalui kedekatan modal kelompok (Hannan & Abdillah, 2019). Hal ini sebagai jaringan saling kenal dan pengakuan atau dalam istilahnya adalah jaringan ikatan lemah dan adanya kesenjangan digital kedua, yaitu akses ketidaksetaraan pada koneksi sosial dalam ikatan jaringan online (Lestyaningrum et al., 2022).

Pembahasan

Kasus Digital Divide pada Digitalisasi Pendidikan

Berdasarkan kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan proses belajar mengajar, pada Juni, 2020 melalui kajian Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (Sawitri et al., 2019) mengemukakan bahwa sebagian besar sekolah masih memilih metode PJJ sebagai model pembelajaran. Kemendikbud mengeluarkan panduan pembelajaran jarak jauh yang menjadi panduan, hal ini disetujui oleh berbagai pihak seperti wali murid siswa serta asosiasi guru sebagaimana yang tergabung dalam kelompok (PGRI) Persatuan Guru Republik Indonesia, (FSGI) Federasi Serikat Guru Indonesia, (IGI) Ikatan Guru Indonesia, (PERGUNU) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, (FGM) Forum Guru Muhammadiyah, dan (IDAI) Ikatan Dokter Anak Indonesia juga merekomendasikan hal ini. Namun situasi ini bukannya tidak memiliki masalah karena masih banyak hal yang patut diperhatikan dan harus ditanggung bersama-sama dalam menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan system Pendidikan nasional, diantaranya adalah infrastruktur, kurikulum, dan peningkatan kapasitas guru.

Dalam rangka perubahan Ujian Nasional (UN) Kemendikbud mengganti sistem penilaian sekolah menjadi Asesmen Nasional. Asesmen ini dilaksanakan sebagai upaya memetakan mutu pendidikan pada keseluruhan sekolah yang ada di indonesia mulai dari pelosok hingga ke kota besar, baik untuk madrasah dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Tiga instrumen dasar yang menjadi panduan dalam pelaksanaan asesmen secara nasional, yakni (1) (AKM) Asesmen kompetensi minimal, (2) Survei karakter serta (3) Survei keadaan lingkungan

belajar (Raini et al., 2022). Asesmen kompetensi minimum merupakan bentuk penilaian suatu kompetensi yang paling dasar dan dibutuhkan oleh keseluruhan siswa sebagai upaya untuk dapat mempertanggung jawabkan kapasitasnya sebagai siswa yang berpartisipasi secara positif dan kolektif dalam kehidupan kemasyarakatan. Dalam mempersiapkan hal tersebut, Kemdikbud melakukan pendataan terhadap kesiapan sekolah pada aspek teknologi dan informasinya yang penulis akses pada website kesiapan TIK Kemdikbud. Adanya kesanggupan dan kesiapan pada teknologi informasi atau penggunaan teknologi pendidikan dikelompokkan dalam 4 definisi utama sehingga dapat mengindikasikan adanya kesanggupan untuk dapat menyelenggarakan penilaian kompetensi minimum, definisi tersebut yaitu:

1. Siap
 - a. Tipe A: Apabila pihak sekolah pernah menyelenggarakan UNBK Mandiri (pada tahun sebelum)
 - b. Tipe B: Jika pihak sekolah mempunyai perangkat komputer sedikitnya berjumlah 15 unit dengan arus listrik yang memadai dan dilengkapi oleh jaringan internet.
 - c. Tipe C: Jika pihak sekolah mempunyai perangkat komputer sedikitnya berjumlah 15 unit dengan arus listrik yang memadai dan dilengkapi oleh jaringan internet, dan memperoleh Bantuan dari Pusat pada tahun 2020 serta program Bantuan DAK 2021
2. Potensi 1: Jika pihak sekolah tersebut mempunyai perangkat komputer sedikitnya berjumlah 15 unit dengan arus listrik yang memadai dan dilengkapi oleh jaringan internet.
3. Potensi 2: Jika pihak sekolah tersebut mempunyai perangkat komputer sedikitnya berjumlah 15 unit dengan arus listrik yang memadai
4. Tidak Siap: Apabila pihak sekolah tidak mempunyai fasilitas ataupun prasarana yang memadai dalam terselenggaranya AKM, misalnya perangkat komputer, arus listrik yang memadai serta jaringan internet.

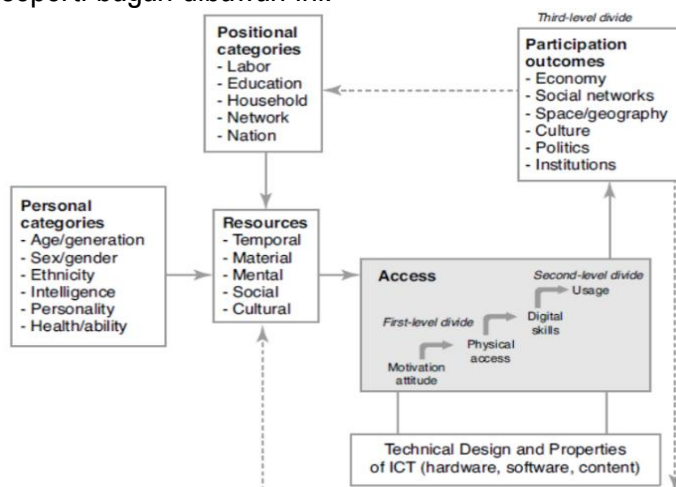
Mengamati data pengklasifikasian TIK tersebut terdapat hasil data bahwa sekolah yang Siap tipe A terdapat 41.272 sekolah dari total 289.856 sekolah. Kemudian sekolah Siap tipe B berjumlah 38.525 sekolah dan Siap tipe C berjumlah 7281. Dari data ini terlihat bahwa sekolah yang Siap tipe C masih membutuhkan dukungan pada perangkat komputer dan sudah memperoleh program Bantuan Pusat tahun 2020 serta Bantuan DAK pada tahun 2021. Berbeda dengan jumlah sekolah dengan status Potensial 1, yang berarti pihak sekolah mempunyai perangkat komputer namun kurang dari 15 unit sehingga belum memadai serta mempunyai aliran arus listrik namun membutuhkan Bantuan Pusat dan Bantuan DAK 2021. Yang menjadi perhatian disini adalah jumlah terbesar ada pada sekolah dengan status potensial 1 sejumlah 151.048 sekolah, artinya selain masih banyak sekali sekolah yang membutuhkan komputer dan ia juga membutuhkan bantuan dari pemerintah. Kemudian sekolah dengan status potensial 2 adalah sejumlah 31.389 sekolah dan sekolah dengan status tidak siap TIK adalah sebesar 20.341 yang artinya sekolah ini sama sekali tidak memiliki fasilitas dan prasarana seperti komputer, jaringan internet dan aliran listrik.

Selain ketidakmerataan dalam infrastruktur, ketidakmerataan dari segi penggunaan juga turut dirasakan oleh sebagian besar guru sebagai tenaga pengajar. Misalnya pada survei yang dilakukan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama di Semarang yang memiliki rekomendasi kebijakan untuk Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI agar dapat meningkatkan diklat TIK Pembelajaran Jarak Jauh, sosialisasi aplikasi e-learning hingga menyarankan untuk membuat aplikasi pembelajaran bagi guru madrasah dan PAI.

Analisa Eksklusi Sosial dan Kebijakan Inklusif

Setelah melihat data tentang digitalisasi pendidikan di Indonesia, kita dapat merenungi kembali pendapat yang dikemukakan oleh (Dijk, 2020) bahwa kategori sosial (usia, gender, etnis,

pekerjaan, pendidikan dan kebangsaan) menjadi indikator yang semakin memperjelas gap digital ini ditinjau dengan menggunakan Model Kausal dari Teori Sumber Daya dan Apropriasi Kesenjangan Digital seperti bagan dibawah ini:



Gambar 2 A Causal Model of Resources and Appropriation Theory of the Digital Divide

Bila ditinjau dari usia misalnya, guru-guru cenderung lebih banyak membutuhkan lebih banyak pelatihan penggunaan alat teknologi informasi. Sebaliknya, untuk penggunaan platform digital sebagai medium pembelajaran, banyak dari guru-guru yang membaca konten-konten pendidikan sedangkan siswa tidak. Jika ditinjau dari kelas sosial, Wisudo (2021) pada Kajian Kritis Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035, menyebutkan bahwa peta jalan ini terkesan bias kelas menengah, ini bisa dilihat dari istilah “SDM unggul”, “internasional” dan “global”. Merdeka belajar dapat diartikan sebagai pendidikan instrumental yang tunduk pada pasar dan menempatkan teknologi informasi sebagai obat mujarab untuk mengatasi persoalan pendidikan. Ketidakmerataan sumber daya pada dunia fisik inilah yang pada akhirnya akan mempengaruhi ketidakmerataan pada dunia digital, padahal seharusnya jika merujuk pada motivasi dibuatnya internet adalah untuk menciptakan masyarakat tanpa memandang perbedaan latar belakang.

Saat ini pada infrastruktur pendidikan di Indonesia sedang dilakukan pemerataan, dengan Bantuan Operasional Sekolah diyakini menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim dapat membantu kepala sekolah dalam mendanai kebutuhan sekolah seperti laptop, kuota data dan gaji guru honorer. Hal ini menurutnya adalah sebagai salah satu kebijakan inklusif Kemendikbud karena setiap sekolah diberikan haknya masing-masing untuk menggunakan dana BOS ini sesuai kebutuhan. Sangat mungkin jika monitoring kebijakan ini dilakukan secara komprehensif mengikuti survey kesiapan TIK, untuk menghindarkan adanya penyelewengan dana, karena maksud dari ‘sesuai kebutuhan’ bisa menjadi ambigu. Maksud komprehensif disini, sekolah dapat diberikan bantuan jika memang ia masuk ke dalam status sebagai sekolah yang benar-benar membutuhkan bantuan, sehingga strategi stimulus ini dapat berfungsi sesuai sasaran. Selain dari sekolah yang membutuhkan sarana, kebijakan ini juga seharusnya juga memperhatikan kesiapan sekolah untuk siswa berkebutuhan khusus, inilah yang belum cukup dikembangkan oleh Kemendikbud tentang bagaimana menanggulangi permasalahan kesenjangan digital para siswa pada kelompok yang terpinggirkan seperti siswa dengan disabilitas.

Jika bicara tentang teknologi pendidikan, maka kita juga tidak bisa menghindarkan permasalahan akses pribadi siswa, karena tentu saja siswa butuh alat belajar seperti laptop untuk proses belajar mengajar dirumahnya. Pada siswa dengan kelas sosial orang tua yang kurang beruntung, maka siswa juga otomatis akan terpinggirkan karena tidak memiliki fasilitas memadai seperti laptop dan ponsel pintar, inilah yang membutuhkan dukungan seluruh komponen

masyarakat, tidak hanya dari program pemerintah namun juga dukungan dari swasta, institusi formal, non-formal hingga mahasiswa karena pada akhirnya siswa akan menjadi output pendidikan yang kemudian akan berkarya pada masyarakat. Dukungan swasta misalnya dukungan dari berbagai industri, misalnya industri telekomunikasi yang menyediakan kuota internet untuk para siswa dan dukungan mahasiswa misalnya dengan melakukan pelatihan terkait penggunaan aplikasi digital serta pelatihan tentang literasi digital. Tingginya animo masyarakat untuk membantu tenaga pengajar dalam pelatihan literasi digital seharusnya membuat pemerintah lebih meningkatkan lagi program pelatihan tenaga pendidik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut, maka selanjutnya dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai upaya mempermudah dalam memahami konteks ataupun inti penelitian sebagai berikut;

1. Masih terdapat kesenjangan dalam pemerataan teknologi Pendidikan yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya yakni pembiayaan, perangkat computer, jaringan internet serta pemerataan pendanaan dimasing-masing daerah. Terlebih adanya kesenjangan pada pihak sekolah, terutama bagi sekolah dengan akses, sarana serta prasarana yang belum memadai untuk dapat melaksanakan pembelajaran secara digital.
2. Para guru sebagai dewan pendidik masih memerlukan pengembangan sumber daya manusia terkait dengan teknologi Pendidikan, sebab lebih dari separuh guru yang ada dalam dunia Pendidikan masih kurang mampu menjalankan pembelajaran digital secara maksimal sehingga lebih memilih untuk menerapkan metode konvensional pada pembelajaran.

References

- Castells, M. (2021). From cities to networks: Power rules. *Journal of Classical Sociology*, 21(3–4), 260–262. <https://doi.org/10.1177/1468795X211022054>
- Dijk, J. Van. (2020). *The Digital Dividen*. Jhon Wiley & Sons.
- Fajriyani, D., Fauzi, A., Devi Kurniawati, M., Yudo Prakoso Dewo, A., Fahri Baihaqi, A., & Nasution, Z. (2023). Tantangan Kompetensi SDM dalam Menghadapi Era Digital (Literatur Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(6), 1004–1013. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i6.1631>
- Habib, M. A. F. (2021). Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 82(2), 2776–7434. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/arrehla/index>
- Hannan, A., & Abdillah, K. (2019). Hegemoni Religio-Kekuasaan dan Transformasi Sosial. *Sosial Budaya*, 16(1), 9.
- Hargittai, E., Gruber, J., Djukaric, T., Fuchs, J., & Brombach, L. (2020). Black box measures? How to study people's algorithm skills. *Information Communication and Society*, 23(5), 764–775. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2020.1713846>
- Holloway, D. (2005). The digital divide in Sydney: A sociospatial analysis. *Information Communication and Society*, 8(2), 168–193. <https://doi.org/10.1080/13691180500146276>
- Iskandar, K., & Anam, S. (2018). Kampung Pendidikan dan Upaya Mensukseskan Program Wajib Belajar 12 Tahun. *JALIE: Journal of Applied Linguistics and Islamic Education*, 17(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.33754/jalie.v2i1.135>

- Kusumadewi, L. R. (2021). *Pendidikan Untuk Apa dan Untuk Siapa? Kajian Kritis Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035*. Yayasan Obor Indonesia.
- Lestyaningrum, I. K. M., Trisiana, A., Safitri, D. A., Supriyanti, Pratama, A. Y., & Wahana, T. P. (2022). *Pendidikan Global Berbasis Teknologi Digital di Era Milenial*. https://www.google.co.id/books/edition/Pendidikan_Global_Berbasis_Teknologi_Dig/xeqbEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1
- Nugraha, F. (2020). *Pendidikan dan Pelatihan: Konsep dan Implementasi dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Litbangdiklat Press.
- Nurfadhilah, N., Siregar, A. A., Rabi'ah, V. M., & Nudin, B. (2019). Model Evaluasi Pembelajaran Pada Masa New Normal : Studi Kasus di SDN 04 Kalisari Kab Grobongan. *El-Tarbawi*, 12(2), 155–179. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol12.iss2.art3>
- Pratama, P. A., & Wardani, D. T. K. (2023). Analisis Faktor Ekonomi, Sosial, Lingkungan dan Kelembagaan Terhadap Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Malioboro Pasca Relokasi di Teras Malioboro 1. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(2), 1–14. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i2.87>
- Presiden Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang-Depdiknas.
- Raini, A., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Tentang Pedagogi Dan Penilaian Pendidikan (Akm = Asesmen Kompetensi Minimum , Survey Karakter Dan Survey Lingkungan Belajar). *Jurnal Program Studi PGMI*, 9(1), 131–142.
- Rasidi, M. A., Hikmatullah, N., & Sobry, M. (2021). Hambatan guru dalam pembelajaran daring: Studi kasus di kelas V MIN 2 Kota Mataram. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(2), 159. <https://doi.org/10.30659/pendas.8.2.159-174>
- Sawitri, E., Astiti, M. S., & Fitriani, Y. (2019). Hambatan Dan Tantangan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 202–213.
- Setiawan, D. (2018). Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 62. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i1.1474>
- Siregar, H. D. P. (2020). Dilema Pembelajaran Online: Antara Efektifitas Dan Tantangan. *Mimbar Agama Budaya*, 37(2), 57–63. <https://doi.org/10.15408/mimbar.v37i2.18918>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Syakilah, A., Untari, R., & Maharani, K. (2019). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2019. In S. Utoyo, L. Anggraini, & E. Sari (Eds.), *Badan Pusat Statistik Indonesia (Vol. 5, Issue 1)*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Yudhistira, S., & Murdiani, D. (2020). Pembelajaran Jarak Jauh: Kendala dalam Belajar dan Kelelahan Akademik. *Maarif*, 15(2), 373–393. <https://doi.org/10.47651/mrf.v15i2.122>

---Halaman ini sengaja dikosongkan---